

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:** Adhayanto, Oksep, 'Perkembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2014), 207
- Admin, 'KPPOD: 347 Peraturan Daerah Terindikasi Bermasalah', *Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah*, 2021 <<https://www.kppod.org/berita/view?id=901>> [accessed 27 October 2022]
- Ahmad Heru Romadhon, Sadjijono, 'Politik Hukum : Menakar Kualitas Reformasi Regulasi Dalam Central Oversight Body', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20.2 (2021), 1231–39
- Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*, Cet-1 (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015)
- Ansori, Lutfil, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Cet-2 (Surabaya: PT. Rajagrafindo Persada, 2918)
- Arifin, Ihsanul Maarif. Firdaus, 'Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Perundang-Undangan', *Litigasi*, 23.2 (2022), 272–90
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, Cet-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto, 'Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal RechtsVinding*, 10.2 (2021), 187–205
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26.3 (2019), 435–57
- Dkk, Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet-10 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, Cet-1 (Bandung: Nusamedia, 2018)
- Haeriah, Mulk, 'Keterkaitan Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi', *Osf.Io*, 2011, 1–9
<<https://osf.io/download/60e4410bef8b3f0428bda3f8/>>
- Harruma, Issha, 'Contoh Perda Diskriminatif', *Kompas.Com*, 2022
<<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/02250091/contoh-perda-diskriminatif>> [accessed 8 February 2023]
- Helmi, Fitria, Retno Kusniati, 'Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.1 (2021), 34–35
- Ibrahim, Johny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet-3 (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007)
- Indonesia, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, 2017)

- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Indonesia, 2011)
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Cet-5* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011)
- Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik, *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Indonesia, 2011)
- , *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Indonesia, 2015)
- Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Indonesia, 2015)
- Indonesia, Presiden Republik, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Indonesia, 2014)
- , *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Indonesia, 2022)
- , *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Indonesia, 2014)
- JJ.H. Bruggink, Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, ed. by Cet-IV, Cet-IV (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Kadek Tegar Wacika, Made Gde Subha Karma Resen, 'Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.9 (2021), 1577–89
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet-VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Kurniasih, Wida, '12 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli', *Gramedia Blog*, 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/>> [accessed 28 October 2022]
- M., Hajar, *Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2013, XX
- Martha Angelica, Mompo Sontyara Sirait, Muhamad Safei, 'Permasalahan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dan Solusinya', *Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI*, 1.1 (2019), 1–31
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Cetakan ke (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2010)
- Mex, Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology*, Edited by (New York: Oxford

- University Press, 1974)
- Muhammad Hikmah, 'Delegasi Wewenang Dalam Undang-Undang Perpajakan', *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1.3 (2018), 320–35
- Nasokah, 'Implementasi Regulatory Impact Assessment (Ria) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15.3 (2008), 443–58
- Nur, Insan Tajali, 'Memantapkan Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan', 2014, 158–74
- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet-6 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-8 (Surabaya: Kencana, 2013)
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Indonesia, 2017)
- , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah* (Indonesia, 1945)
- Rokilah, Sulasno, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 179–90
- Romadhon, Ahmad Heru, and Sadjijono Sadjijono, 'Politik Hukum: Menakar Kualitas Reformasi Regulasi Dalam Central Oversight Body', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20.2 (2022), 1231–39
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Cet-5 (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020)
- Setiadi, Wicipto, 'Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.1 (2012), 1–10
- Sihombing, Eka N A M, 'Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah', *Jurnal Reformasi Hukum*, 23.2 (2018), 169–88
- Sihombing, Levolt, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, and Mahmul Siregar, 'Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 230–39
- Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, 'Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang- Undangan', in *Modul HKUM4403*, 2015, pp. 1–44
- Sukardi, *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah*, Cet 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
- Tirtamulia, Tjondro, *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, Dan Desa*, Cet-2 (Surabaya: Universitas Surabaya, 2018)
- Tjandra, W Riawan, 'Negara Yang Hadir Dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)', *E-Journal.Uajy.Ac.Id*, 1.1 (2020), 1–8
- Tohadi, 'Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah

- Dalam Omnibus Law', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), 125–41
- Triputra, Yuli Asmara, 'Harmonisasi Peraturasn Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnul Lex Librum*, 3.1 (2016), 417–27
- Utama, Yos Johan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet-4 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017)
- Yarn, Meri, 'Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2014), 155–72
- Zarkasi, A., 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2.4 (2010), 104–20

